

RENCANA KERJA

TAHUN 2020



BKPSDM

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun rancangan awal rencana kerja Tahun 2020.

Rencana kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan rencana kerja ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, April 2019

Pih. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. PESISIR SELATAN



IWARDI, S.H
NIP. 19670601 19503 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan SDM aparaturnya. Pengembangan SDM aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor-faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, SDM aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen dibidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif.

Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja OPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020 adalah untuk memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan Pemerintah Daerah umumnya.

Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan semula dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD 2020 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang/struktur yang ada. Kemudian masing – masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/ kebijakan

pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk rencana kerja organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2018)
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama Tahun 2018 tercakup dalam 6 hal, yaitu:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
 - b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan
 - c. Realialisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
 - d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra
 - f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut
- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan**

Pada tahun 2018 ini, kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Penerimaan Calon PNS
Target jumlah formasi yang diterima sebagai calon PNS sebanyak 300 formasi, namun hanya bisa terealisasi sebanyak 238 orang (79.33 %)
- b. Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun
Target berkas PNS yang diusulkan untuk menerima satya lencana karya satya X, XX dan XXX Tahun sebanyak 150 orang, namun hanya bisa terealisasi sebanyak 148 orang (98,67 %)
- c. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Target jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar sebanyak 16 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 12 orang (75 %)
- d. Pengelolaan administrasi mutasi pegawai

Target jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional sebanyak 300 orang, namun terealisasi sebanyak 275 orang (91,67%)

e. Penyelenggaran Majelis Pertimbangan Pegawai

Target sidang yang dilakukan oleh tim Majelis Pertimbangan Pegawai sebanyak 6 kali sidang, namun cuma bisa terealisasi 5 kali sidang. (83,33%)

f. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Target sidang yang dilakukan oleh Tim Baperjakat selama tahun 2018 sebanyak 18 kali sidang, namun hanya bisa direalisasinya sebanyak 16 kali sidang (88,89%)

g. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Target jumlah PNS yang menjadi peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi sebanyak 41 orang, tapi realisasi hanya sebanyak 27 orang (65,85%)

h. Pembekalan ASN yang memasuki purnabakti

Target jumlah PNS yang mengikuti pembekalan sebelum pensiun sebanyak 105 orang, tapi hanya terealisasi sebanyak 86 orang (81,90%)

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target keinerja selama tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administarasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa
- Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)
 - Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, terdiri dari 1 kegiatan:
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
- e. Program pendidikan kedinasan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS
 - Pendidikan dan pelatihan PIM Tk. IV
 - Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - Penyusunan formasi PNS
 - Pengelolaan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar PNS
 - Pengkoreksian angka kredit
 - Pemetaan potensi pejabat struktural

3. Realialisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan

Program yang melebihi target adalah program pembinaan dan pengembangan aparatur yaitu sebesar 103,35 %, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang melebihi target, yaitu:

- a. Pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu dan taspen.

Target PNS yang menyampaikan berkas untuk diusulkan ke Kantor Regional XII sebanyak 550 orang, yang terealisasi sebanyak 594 orang (108 %)

- b. Pengelolaan administrasi pensiun pegawai

Target jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda, APS (atas permintaan sendiri) dan MPP sebanyak 200 orang, terealisasi sebanyak 225 orang (112,50 %)

- c. Pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian

Target PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian sebanyak 30 kasus, dengan realisasi 36 kasus (120 %)

- d. Pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan

Target diadakannya acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan sebanyak 18 kali, dengan realisasi 20 kali (166,67 %)

- e. Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian

Target data PNS yang dientry dalam jaringan data base selama tahun 2018 sebanyak 2700 data, dengan realisasi sebanyak 5000 data (185,19%)

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

Pada tahun 2018 ini, kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Penerimaan Calon PNS

Target jumlah formasi yang diterima sebagai calon PNS sebanyak 300 formasi, namun hanya bisa terealisasi sebanyak 238 orang (79.33 %). Hal ini disebabkan karena tidak terisinya beberapa formasi, yaitu sbb:

- Formasi Kategori 2 sebanyak 15 formasi
- Formasi Dokter spesialis sebanyak 14 formasi
- Formasi teknis sebanyak 4 orang

- b. Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun

Target berkas PNS yang diusulkan untuk menerima satya lencana karya satya X, XX dan XXX Tahun sebanyak 150 orang, namun hanya bisa terealisasi sebanyak 148 orang (98,67 %). Hal ini dikarenakan bahan yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan satyalencana karya satya hanya sebanyak 148 orang.

c. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Target jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar sebanyak 16 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 12 orang (75 %). Hal ini dikarenakan calon penerima bantuan beasiswa Strata 2 (S2) program Bappenas tidak lulus tes masuk, dan anggaran yang tersedia untuk bantuan S2 tersebut tidak bisa dipergunakan.

d. Pengelolaan administrasi mutasi pegawai

Target jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional sebanyak 300 orang, namun terealisasi sebanyak 275 orang (91,67%). Hal ini disebabkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional hanya sebanyak 275 orang.

e. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai

Target sidang yang dilakukan oleh tim Majelis Pertimbangan Pegawai sebanyak 6 kali sidang, namun cuma bisa terealisasi 5 kali sidang. (83,33%). Hal ini dikarenakan jadwal sidang yang bisa dilaksanakan oleh Tim MPP yang terbatas.

f. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Target sidang yang dilakukan oleh Tim Baperjakat selama tahun 2018 sebanyak 18 kali sidang, namun hanya bisa direalisasinya sebanyak 16 kali sidang (88,89%). Hal ini dikarenakan jadwal sidang bisa dilaksanakan oleh Tim Baperjakat terbatas.

g. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Target jumlah PNS yang menjadi peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi sebanyak 41 orang, tapi realisasi hanya sebanyak 27 orang (65,85%). Hal ini dikarenakan Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini akan diselenggarakan setelah perubahan anggaran, namun karena arahan pimpinan dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan maka kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun 2019.

h. Pembekalan ASN yang memasuki purnabakti

Target jumlah PNS yang mengikuti pembekalan sebelum pensiun sebanyak 105 orang, tapi hanya terealisasi sebanyak 86 orang (81,90%). Hal ini

disebabkan peserta yang datang untuk mengikuti pembekalan hanya mencapai 86 orang.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2018, ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target, maka diperlukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat pelaksana teknis kegiatan lebih fokus lagi dalam perencanaan baik dari segi penganggaran maupun dari segi pelaksanaan.
- b. Kuasa pengguna anggaran harus melakukan monitoring dan evaluasi secara kontiniu terhadap kegiatan yang dikelolanya
- c. Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan, hal ini mengurangi terjadinya kesalahan yang timbul pada saat kegiatan sedang berlangsung.
- d. Melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan.
- i. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus.
- j. Mengevaluasi lebih lanjut mengenai anggaran kegiatan agar bisa direalisasikan sebaik mungkin.
- k. Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Secara ringkas dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut:

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. PESISIR SELATAN											
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
						Target Renja Perangkat Daerah 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 00	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00	Urusan : Penunjang Urusan										
3 00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
3 00	01	02	Tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	50%
3 00	01	03	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	50%
3 00	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	50%
3 00	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	50%
3 00	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	50%
3 00	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	50%

3	00	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 Bulan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	50%
	00	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 Bulan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	50%
3	00	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 Bulan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	50%
3	00	01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Instansi Terkait	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	50%
3	00	01	16	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan Instansi Terkait selama 12 Bulan	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	50%
3	00	01	19	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan	100%	-	100%	100%	100%	100%	40%
3	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3	00	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	204 jenis	58 jenis	10 jenis	100%	12 jenis	80 jenis	39.22%
3	00	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27 unit	7 unit	4 unit	100%	2 unit	13 unit	48.15%
3	00	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 Bulan	10 jenis	Perbaikan gedung kantor dan 1 paket kanopi	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	60%
3	00	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	500%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	60%
3	00	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	342	64 unit	73 unit	100%	77 unit	214 unit	62.57%

[illegible]

3	00	15	10	Pelaksanaan Festival Langkisau	Berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan festival langkisau	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%
3	00	29		Program Pendidikan Kedisnasan									
3	00	29	06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	PIM TK.II : 32 org PIM TK.III : 58 org LPJ Gol.III: 28 org	PIM II : 6 org PIM III : 8 org	PIM TK.II (2 org), PIM TK.III (7 org), LPJ Gol. III (3 org)	PIM TK.II (2 org), PIM TK.III (6 org)	66.67%	PIM TK.II : 6 org PIM TK.III : 8 org LPJ Gol. III : 7 org	PIM TK.II : 14 org PIM TK.III : 22 org LPJ Gol. III: 7 orang	36.44%
3	00	29	08	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	190 orang	40 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	100 orang	52.63%
3	00	29	09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan	376 orang	30 orang	160 orang	160 orang	100%	66 orang	256 orang	68.09%
3	00	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
3	00	31	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi PNS	1004 orang	-	PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)	PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)	100%	200 orang	404 orang	40.24%
3	00	31	40	Pemberian Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	1050 orang PNS	150 orang PNS	150 orang PNS	150 orang PNS	100%	150 orang PNS	450 orang PNS	42.86%
3	00	31	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatn Dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	384 orang (S1 dan S2)	S1 : 54 org S2 : 59 org	S1 : 28 org S2 : 49 org	S1 : 22 org S2 : 38 org	77.92%	61 org S1 & S2	234 orang (S1 dan S2)	60.94%
3	00	31	16	Penyusunan Formasi PNS	Tercapainya Penyusunan Formasi PNS	12550 data	2000 orang	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	100%	2110 orang	6220 orang	49.56%

3	00	31	17	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	Tercapainya kegiatan penyusunan rencana karir PNS, DUK dan Bazetting	150 DUK dan Bazetting	15 buku DUK, 15 buku bazetting	15 buku DUK, 15 buku bazetting	100%	-	30 buku DUK, 30 buku bazetting	40%
3	00	31	41	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan pemakaian gelar	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	8180 berkas	1140 berkas	1400 berkas	88.57%	1600 berkas	3980 berkas	48.66%
3	00	31	36	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan Fungsional	601 PNS	32 PNS	200 PNS	64.50%	200 PNS	361 PNS	60.07%
3	00	31	22	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	2000 berkas	462 berkas	500 berkas	97.60%	300 berkas	1250 berkas	62.50%
3	00	31	25	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP	30 kali sidang	6 kali sidang	4 kali sidang	150%	6 kali sidang	18 kali sidang	60%
3	00	31	26	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim Baperjakat	56 kali sidang	8 kali sidang	4 kali sidang	600%	12 kali sidang	44 kali sidang	78.57%
3	00	31	27	Pelayanan dan Pendistribusian serta perbaikan kartu pegawai elektronik	Jumlah kartu yang didistribusikan	1622 Lembar	500 Lembar	200 Lembar	261%	-	1022 Lembar	63.01%
3	00	31	28	Pengkoreksian Angka Kredit	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional	5721 berkas	875 berkas	1050 berkas	90.10%	1050 berkas	2871 berkas	50.18%
3	00	31	37	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Pensiun BUP, Janda/Duda dan APS	1187 berkas	179 berkas	185 berkas	112%	200 berkas	587 berkas	49.45%
3	00	31	38	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Jumlah Data PNS yang di Update dalam Jaringan Database	35778 data	-	7150 data	100.39%	7150 data	14328 data	40.05%
3	00	31	39	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	273 kasus	-	30 kasus	190%	30 kasus	87 kasus	31.87%

3	00	31	45	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	475 berkas	-	150 berkas	175 berkas	116.67%	-	175 berkas	36.84%
3	00	31	44	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	Jumlah Sumpah dan pelantikan jabatan yang dilaksanakan	32 kali	-	5 kali	5 kali	100%	12 kali	17 kali	53.13%
3	00	31	49	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi	354 orang	14 jabatan eselon II terisi	-	-	-	-	74 orang	20.90%
3	00	31	43	Rakor kepegawaian pemerintah provinsi Sumatera barat dengan pemerintah kab/kota se-sumatera barat	Jumlah peserta yang ikut rakor kepegawaian	72 orang	-	72 orang	72 orang	100%	-	72 orang	100%
3	00	31	52	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural	Tercapainya pemetaan potensi pejabat struktural	1628 orang PNS	-	803 orang PNS	803 orang PNS	100%	225 orang PNS	1028 orang PNS	63.14%
3	00	31	53	Pembekalan ASN yang memasuki Purnabakti	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan ASN yang memasuki purnabakti	330 orang	-	-	-	-	-	105 orang	31.82%
1	20	31	05	Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara Online	Jumlah data yang diolah dalam SAPK	4000 data	1000 data	-	-	-	-	1000 data	25%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

N O	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE 2015	CAPAIAN TAHUN		TARGET	REALISASI	OPD
			2017	2018	2018	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
C. ASPEK PELAYANAN UMUM							
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
A	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	20	20	25	28.91	44.35	BKPSDM
B	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	28	35	35	35	BKPSDM
C	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	132	132	158	158	156	BKPSDM
D	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	4790	4790	4800	4809	4865	BKPSDM

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari identifikasi permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah:

- Masih sulitnya koordinasi dengan Dinas/Instansi kementerian dan propinsi.
Sulitnya melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi kementerian dan propinsi terkait, maka pelayanan jelas memakan waktu lama karena berkas kepegawaian masih harus dikirim dan atau perlu menunggu keputusan dari dinas/instansi tersebut. Belum lagi karena jarak tempuh pegawai pemakai jasa layanan dengan BKPSDM juga tidak dekat.
- Masih kurangnya tenaga ahli (IT) yang dapat secara maksimal melaksanakan SIMPEG di Kabupaten Pesisir Selatan
- Jauhnya letak instansi dengan pemakai jasa layanan, maka sebisa mungkin pembinaan dan sosialisasi peraturan kepegawaian dilaksanakan dengan metode

penyuluhan baik di Badan Kepegawaian sendiri maupun mendatangi dan mengumpulkan pegawai dimasing-masing OPD agar tercipta profesionalitas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ahli dibidangnya, bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan punya komitmen.

- d. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan kurang proaktifnya dinas instansi dalam melaksanakan koordinasi kepegawaian karena jarak tempuh antara BKPSDM dengan pegawai pemakai jasa layanan, Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

Untuk informasi kepegawaian sebisa mungkin tidak terkendala dengan jarak, sebab BKPSDM telah berusaha mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan BKPSDM, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
 - a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.
 - b. Sarana prasarana pelayanan administrasi BKPSDM yang masih kurang memadai.
 - c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :
 - a. Tingkat pemahaman/pendidikan pemakai jasa layanan terhadap peraturan kepegawaian
 - b. Belum terdatanya SDM aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di beberapa OPD oleh Baperjakat Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Kurangnya SDM aparatur di beberapa OPD sehingga penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

Nama OPD : Badan Kepagawaian dan Pengembangan SDM
Rancangan Awal RKPD

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM											
Rancangan Awal RKPD											
Hasil Analisis Kebutuhan											
Catt Penting											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											
Indikator Kinerja											
Lokasi											
Program/Kegiatan											
Pagu Indikator (Rp.000)											
Target Capaian											

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		Peningkatan Keterampilan dan	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

No	Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV	IV Jurai	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV	01/01/2017	Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV	IV Jurai	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV	01/01/2017	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV	01/01/2017
2										
3										
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
1	Seleksi Penerimaan CPNS	IV Jurai	Jumlah pelamar dari GTT/PTT dan pelamar umum yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS	PTT Bidan : 182 org PTT Dokter : 4 org Penyuluh : 18 org	169.160.000	Seleksi Penerimaan CPNS	IV Jurai	Jumlah pelamar dari GTT/PTT dan pelamar umum yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS	PTT Bidan : 182 org PTT Dokter : 4 org Penyuluh : 18 org	130.850.000
2	Pemberian Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX tahun	150 Orang PNS	31.797.982	Pemberian Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX tahun	150 Orang PNS	31.797.982
3	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	IV Jurai	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan belajar dan ikatan dinas	S1 : 28 Org S2 : 49 Org	403.372.084	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	IV Jurai	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan belajar dan ikatan dinas	S1 : 28 Org S2 : 49 Org	333.353.768
4	Penyusunan Formasi PNS	IV Jurai	Jumlah kebutuhan PNS sesuai dengan formasi	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	74.873.000	Penyusunan Formasi PNS	IV Jurai	Jumlah kebutuhan PNS sesuai dengan formasi	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	101.518.000
5	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	IV Jurai	Jumlah buku DUK dan Bazetting	15 buku DUK, 15 Buku Bazetting	49.347.240	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	IV Jurai	Jumlah buku DUK dan Bazetting	15 buku DUK, 15 Buku Bazetting	46.176.940
6	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	1400 berkas	175.628.472	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	1400 berkas	196.547.472
7	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	IV Jurai	Jumlah PNS yang mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional	200 PNS	33.852.140	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	IV Jurai	Jumlah PNS yang mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional	200 PNS	47.059.840
8	Pengelolaan ADW Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu dan taspen	500 berkas	30.530.522	Pengelolaan ADW Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu dan taspen	500 berkas	49.388.884

No	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	IV Juri	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim MPP	4 Kali sidang	3/002/002	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	IV Juri	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim MPP	4 Kali sidang	3/002/002
9										
10	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	IV Juri	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Baperjakat	4 Kali Sidang	45.049,444	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	IV Juri	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Baperjakat	4 Kali Sidang	48.989,208
11	Pelayanan dan Pendistribusian serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik	IV Juri	Jumlah kartu KPE yang didistribusikan ke PNS	200 Lembar	41.354,080	Pelayanan dan Pendistribusian serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik	IV Juri	Jumlah kartu KPE yang didistribusikan ke PNS	200 Lembar	36.304,080
12	Pengkoreksian Angka Kredit	IV Juri	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional	1050 Berkas	32.567,058	Pengkoreksian Angka Kredit	IV Juri	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional	1050 Berkas	32.567,058
13	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	IV Juri	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda dan APS	BUP : 150 berkas Janda/Duda : 30 berkas APS : 5 berkas MPP : berkas	61.961,300	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	IV Juri	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda dan APS	BUP : 150 berkas Janda/Duda : 30 berkas APS : 5 berkas MPP : berkas	63.332,980
14	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	IV Juri	Jumlah data PNS yang dientry dalam jaringan data base	7.150 data	170.327,560	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	IV Juri	Jumlah data PNS yang dientry dalam jaringan data base	7.150 data	158.533,410
15	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	IV Juri	Jumlah kasus PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian untuk diberikan rekomendasi	30 Kasus	45.124,844	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	IV Juri	Jumlah kasus PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian untuk diberikan rekomendasi	30 Kasus	45.124,844
16	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural	IV Juri	Jumlah pejabat struktural dan PNS Gol III yang mendapatkan tes pemetaan potensi	400 Orang PNS	270.651,080	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	IV Juri	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	150 berkas	70.618,224
17						Pengambilan Sumpahan dan Pelantikan Jabatan	IV Juri	Jumlah pejabat struktural yang dilantik dan disumpah	5 kali	31.430,754
18						Rakor Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat	IV Juri	Teraksananya rapat-rapat koordinasi kepegawaian pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat	12 orang	100.906,000

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KALAMANDIA

Indikator 1.1	
Indikator 1.2	
Jumlah pejabat struktural dan PNS Gol III yang mendapatkan tes pemetaan potensi	
IV. Jumlah	
Penilaian Potensi Pejabat Struktural	
19	

Tujuan khusus Kalamandian Nasional

1.1 Tujuan dan Sasaran Kalamandian Nasional

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat struktural dan fungsional, Kalamandian Nasional harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek-aspek teknis, manajerial, dan interpersonal. Selain itu, Kalamandian Nasional juga harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kalamandian Nasional harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek-aspek teknis, manajerial, dan interpersonal. Selain itu, Kalamandian Nasional juga harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalamandian Nasional harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek-aspek teknis, manajerial, dan interpersonal. Selain itu, Kalamandian Nasional juga harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1.2 Tujuan dan Sasaran Kalamandian Nasional sebagai Pejabat Struktural

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat struktural, Kalamandian Nasional harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek-aspek teknis, manajerial, dan interpersonal. Selain itu, Kalamandian Nasional juga harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kalamandian Nasional harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek-aspek teknis, manajerial, dan interpersonal. Selain itu, Kalamandian Nasional juga harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalamandian Nasional harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek-aspek teknis, manajerial, dan interpersonal. Selain itu, Kalamandian Nasional juga harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan dari Badan Kepegawaian Negara

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015-2019, yaitu : ***“Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025”***. Istilah “professional” dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja.

Bermartabat, istilah “bermartabat” dimaksudkan bahwa PNS melaksanakan kewenangan fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digarisi melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN, menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.1.2 Telaahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2015-2019 yaitu ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi”***.

Adapun aparatur negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Agar program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka ditetapkan tujuan dan sasarnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan Tahun 2020 dapat kita uraikan berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah, Penyebarluasan informasi pembangunan.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; penyebarluasan informasi pembangunan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Pengembangan Data/Informasi

Tujuan :

Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan.

Sasaran :

Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek, Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT).

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan, penunjang bintek dan kursus keterampilan, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek, Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT).

5. Program Pendidikan Kedinasan

Tujuan :

Terlaksananya pendidikan kedinasan untuk Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; Diklat Prajabatan CPNS Daerah,

Sasaran :

Terwujudnya pendidikan kedinasan untuk aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Aparatur lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; Diklat Prajabatan CPNS Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan :

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon ASN; pemberian bantuan dan pengelolaan administrasi ijin/tugas

belajar, penyusunan formasi PNS, penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai, Pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu, Pengelolaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan administrasi pensiun pegawai, pengembangan dan pengelolaan SIMPEG dan SAPK, Pengelolaan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar, Pemeriksaan kasus PNS masalah perceraian dan pembinaan disiplin PNS, Pelaksanaan penyesuaian ijazah dan ujian dinas, pembekalan Calon ASN, Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, pemetaan potensi ASN, pembekalan pasangan pra nikah ASN, Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kinerja ASN, pengelolaan tata naskah dinas, penyuluhan dan sosialisasi peraturan ASN, Pemberian reward pada PNS Teladan (berkinerja) dan satya lencana karya satya

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon ASN; pemberian bantuan dan pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar, penyusunan formasi PNS, penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai, Pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu, Pengelolaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan administrasi pensiun pegawai, pengembangan dan pengelolaan SIMPEG dan SAPK, Pengelolaan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar, Pemeriksaan kasus PNS masalah perceraian dan pembinaan disiplin PNS, Pelaksanaan penyesuaian ijazah dan ujian dinas, pembekalan Calon ASN, Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, pemetaan potensi ASN, pembekalan pasangan pra nikah ASN, Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kinerja ASN, pengelolaan tata naskah dinas, penyuluhan dan sosialisasi peraturan ASN, Pemberian reward pada PNS Teladan (berkinerja) dan satya lencana karya satya

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2020 ditetapkan 6 program dengan 51 kegiatan pendukung, sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Hasil :

Terbayarnya jasa telpon, air dan listrik

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

Hasil :

Bersih dan nyamannya suasana kantor

Kelompok Sasaran :

Ruang kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM

Hasil :

Lancarnya jasa administrasi keuangan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terbayarnya jasa petugas kebersihan

Hasil :

Bersih dan Nyamannya suasana kantor

Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor.

Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan selama 12 bulan

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan

10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait

Hasil :

Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

12. Penunjang Penyusunan Pelaporan OPD

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah laporan yang dilaporkan

Hasil :

21 laporan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Sarana kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran.

Kelompok Sasaran :

Sarana kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor selama 12 bulan.

Hasil :

Adanya ruang rapat dan pagar kantor yang representatif.

Kelompok Sasaran :

Sarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Pemeliharaan Rutin/ Berakala Kendaraan Dinas/ Operasional

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah kendaraan dinas/perasional yang dipelihara secara rutin/berkala.

Hasil :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

Kelompok Sasaran :

Kendaraan dinas operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala.

Hasil :

Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

Kelompok Sasaran :

Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

III. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan

Hasil :

Tersebaranya informasi pembangunan

Kelompok Sasaran :

OPD BKPSDM

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dan Kursus Keterampilan.

Hasil :

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pelaksanaan Achievment Motivation Training (AMT)

Masukan :

Dana yang tersedia.

Keluaran :

Terlaksananya Achievment Motivation Training (AMT)

Hasil :

Tercapainya Achievment Motivation Training (AMT).

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimtek

Hasil :

Diterima sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

V. Program Pendidikan Kedinasan

1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur.

Hasil :

Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur.

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Hasil :

Diterimanya sertifikat diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pendidikan dan Pelatihan Pra jabatan bagi CPNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan.

Hasil :

Sertifikat Diklat Prajabatan untuk CPNS yang mengikuti diklat.

Kelompok Sasaran :

Aparatur CPNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Seleksi Penerimaan Calon ASN

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi ASN

Hasil :

Diterimanya SK ASN

Kelompok Sasaran :

Aparatur CPNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pemberian Bantuan dan Pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dan surat keterangan ijin dan tugas belajar

Hasil :

Terbayarkan bantuan tugas belajar dan surat keterangan ijin dan tugas belajar

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang memasukkan permohonan

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Penyusunan Formasi PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tercapainya Penyusunan Formasi PNS.

Hasil :

Tersusunnya kebutuhan PNS sesuai dengan formasi.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP.

Hasil :

Keluarnya hasil keputusan disiplin terhadap kasus PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Pengelolaan administrasi Karpeg, Karis/Karsu

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu

Hasil :

PNS mendapatkan karpeg, karis/karsu

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pemberian Bantuan dan Pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dan surat keterangan ijin dan tugas belajar

Hasil :

Terbayarkan bantuan tugas belajar dan surat keterangan ijin dan tugas belajar

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang memasukkan permohonan

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Penyusunan Formasi PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tercapainya Penyusunan Formasi PNS.

Hasil :

Tersusunnya kebutuhan PNS sesuai dengan formasi.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP.

Hasil :

Keluarnya hasil keputusan disiplin terhadap kasus PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Pengelolaan administrasi Karpeg, Karis/Karsu

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu

Hasil :

PNS mendapatkan karpeg, karis/karsu

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Pengelolaan administrasi mutasi pegawai

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional.

Hasil :

Diterimanya SK defenitif PNS

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

7. Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, Janda/Duda dan APS, Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Hasil :

SK pensiun PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

8. Pengembangan dan Pengelolaan SISMPEG dan SAPK

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah data PNS yang di update dalam jaringan database.

Hasil :

Tersimpan data PNS di database untuk informasi kepegawaian.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

9. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar.

Hasil :

PNS yang menerima SK kenaikan pangkat.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

12. Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan disiplin PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi.

Hasil :

Rekomendasi yang dikeluarkan bagi PNS yang melanggar Disiplin dan masalah perceraian.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

13. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Hasil :

Diterimanya Serftifikat Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

14. Pembekalan Calon PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan calon PNS

Hasil :

Diterimanya Serftifikat pembekalan

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

15. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi

Hasil :

Terpilihnya pejabat pimpinan tinggi

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

16. Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah diadakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan.

Hasil :

SK jabatan struktural/fungsional.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

17. Pemetaan Potensi ASN

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti pemetaan potensi

Hasil :

Terpetakan potensi pejabat struktural.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

18. Pembekalan Pasangan Pra Nikah PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pasangan PNS yang dibekali.

Hasil :

Rekomendasi untuk melakukan pernikahan

Kelompok Sasaran :

PNS Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

19. Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan dalam rangka melakukan penilaian kinerja ASN

Hasil :

Tercapainya sidang penilaian kinerja ASN

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

20. Pengelolaan Tata Naskah Dinas

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tersusunnya tata naskah dinas kepegawaian

Hasil :

Tata naskah dinas menjadi rapi

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

21. **Penyuluhan dan Sosialisasi tentang peraturan ASN**

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah penyuluhan dan sosialisasi

Hasil :

Diterimanya sertifikat

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

22. **Pemberian reward pada PNS Teladan (berkinerja) dan satya lencana karya satya**

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah ASN yang diberikan reward dan berkas satya lencana yang diusulkan

Hasil :

Adanya pegawai berkinerja dan piagam satya lencana karya satya

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Rencana kerja Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 (terlampir).



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2020 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, April 2019

Plh. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. PESISIR SELATAN



WARDI, S.H
NIP. 19670601 19503 1 005

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00	Urusan : Penunjang Urusan								
3 00 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				602,042,200				554,942,200
3 00 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Kec. IV Jurai	12 bulan	108,000,000	APBD		100%	60,900,000
3 00 04 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan	Kec. IV Jurai	12 bulan	10,000,000	APBD		12 bulan	10,000,000
3 00 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Pembayaran/ Honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM	Kec. IV Jurai	12 bulan	95,250,000	APBD		12 bulan	95,250,000
3 00 04 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan	Kec. IV Jurai	12 bulan	38,819,400	APBD		12 bulan	38,819,400
3 00 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. IV Jurai	12 bulan	34,297,000	APBD		12 bulan	34,297,000
3 00 04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Operasional BKPSDM selama 12 Bulan	Kec. IV Jurai	12 bulan	47,332,000	APBD		12 bulan	47,332,000
3 00 04 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 Bulan	Kec. IV Jurai	12 bulan	8,866,300	APBD		12 bulan	8,866,300
3 00 04 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 Bulan	Kec. IV Jurai	12 bulan	14,500,000	APBD		12 bulan	14,500,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 Bulan	Kec. IV Jurai	12 bulan	44,577,500	APBD		12 bulan	44,577,500
3 00 04 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Instansi Terkait	Jakarta, Pekanbaru & Padang	12 bulan	110,300,000	APBD		100%	110,300,000
3 00 04 01 16	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan Instansi Terkait selama 12 Bulan	Kecamatan dlm Kab. Pessel	12 bulan	64,700,000	APBD		100%	64,700,000
3 00 04 06 01	Penunjang Penyusunan Pelaporan OPD	Tersusunnya Dokumen Laporan OPD selama 12 Bulan	Kec. IV Jurai	21 laporan	25,400,000	APBD		21 laporan	25,400,000
3 00 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				683,304,500				476,431,500
3 00 04 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. IV Jurai	AC 3 unit, Laptop 2 unit, hardisk eksternal 2 unit,	81,400,000	APBD		100%	81,400,000
3 00 04 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. IV Jurai	1 unit genset 30 kVA	180,000,000	APBD		100%	87,560,000
3 00 04 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 Bulan	Kec. IV Jurai	Ruang Arsip, pembuatan selokan belakang kantor, ruang konsultasi, Kanopi	198,000,000	APBD		100%	83,567,000
3 00 04 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Kec. IV Jurai	3 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 5 unit kendaraan	181,962,500	APBD		3 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 5 unit	181,962,500
3 00 04 02 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kec. IV Jurai	1 unit genset, 18 unit PC, 14 unit laptop, 10 unit mesin tik, 12 unit AC dan 16 unit printer	41,942,000	APBD		1 unit genset, 18 unit PC, 14 unit laptop, 10 unit mesin tik, 12 unit AC dan 16 unit printer	41,942,000
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Kec. IV Jurai	2 unit motor vario	50,000,000	APBD		-	0
3 00 04 15	Program pengembangan data/informasi				30,000,000				30,000,000
	Penyebarluasan informasi pembangunan	jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan	Kec. IV Jurai	5 kegiatan	30,000,000			5 kegiatan	30,000,000

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
3 00 04 05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus Keterampilan		Padang, Jakarta, Pekanbaru	7 orang	595,875,000	APBD		7 orang	295,875,000
3 00 04 05 04		Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan						50,000,000	APBD			50,000,000
3 00 04 05 05		Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)		Jumlah peserta yang mengikuti Achievement Motivation Training (AMT)		Kec. IV Jurai	100 orang	95,875,000	APBD		40 orang	95,875,000
3 00 04 05 06		Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimtek		Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimtek dalam 12 bulan		Kec. IV Jurai	6 kegiatan	450,000,000	APBD		5 kegiatan	150,000,000
3 00 04 29		Program Pendidikan Kedinasan						1,454,936,834				1,454,936,834
3 00 04 29 06		Peningkatan Keterampilan Profesionalisme	dan	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Kec. IV Jurai Padang & Jakarta	Diklat PIM II: 4 org. & Diklat PIM III: 8 org		663,960,000	APBD		Diklat PIM II: 4 org, Diklat PIM III: 8 org	663,960,000
3 00 04 29 07		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS		Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan	Kec. Dim Kab. Pessel dan Padang	200 orang		401,276,834	APBD		200 orang	401,276,834
3 00 04 29 08		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV		Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Kec. Dim Kab. Pessel dan Padang	30 orang		389,700,000	APBD		30 orang	389,700,000

1			2		3		4	5	6	7	8	9	10
3	00	04	30	02	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				2,087,353,800				1,960,353,800
3	00	04	30	02	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi ASN	Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dim. Kab. Pessel	200 orang	169,680,000	APBD		200 orang	169,680,000
3	06	04	30	11	Pemberian bantuan dan pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan surat ijin/tugas belajar yang terbit	Kec. IV Jurai	bantuan 20 orang, ijin/tugas belajar 200 orang	178,654,000	APBD		bantuan 20 orang, ijin/tugas belajar 200	178,654,000
3	00	04	30	18	Penyusunan Formasi PNS	Tercapainya Penyusunan Formasi PNS	Jkt. Pdg & Kec. Dim. Kab. Pessel	1236 orang	56,438,000	APBD		1236 orang	56,438,000
3	00	04	30	20	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP	Kec. Dim. Kab. Pessel	6 kali sidang	48,600,000	APBD		6 kali sidang	48,600,000
3	00	04	30	23	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu	Jumlah berkas PNS yang di proses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu	Pekanbaru, Padang & Kec. Dim.	500 orang	43,226,700	APBD		500 orang	43,226,700
3	00	04	30	25	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan Fungsional	Pdg & Kec. Dim. Kab. Pessel	200 orang	57,233,400	APBD		200 orang	57,233,400
3	00	04	30	26	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Pensiun BUP, Janda/Duda dan APS	Jkt. Pkn br Pdg & Kec. Dim. Kab. Pessel	300 orang	75,754,000	APBD		300 orang	75,754,000
3	00	04	30	27	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawain (SIMPEG) dan SAPK	Pengembangan aplikasi SIMPEG dan SAPK	Kec. IV Jurai	1 aplikasi	130,000,000	APBD		1 aplikasi	130,000,000
3	00	04	30	30	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	Jkt. Pkbr, Pdg & Kec. Dim. Kab.	1600 orang	162,300,000	APBD		1600 orang	162,300,000
3	00	04	30	33	Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan pembinaan disiplin ASN	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi, dan monitoring disiplin ASN	Kec. IV Jurai	30 kasus dan 30 orang	75,000,000	APBD		30 kasus dan 30 orang	75,000,000
3	00	04	30	35	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Kec. IV Jurai, Padang	125 orang	65,348,000	APBD		125 orang	65,348,000
3	00	04	30	36	Pembekalan Calon PNS	Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan calon PNS	Kec. IV Jurai, Padang	300 orang	65,000,000	APBD		300 orang	65,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 04 30 40	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi	Kec.IV Jurai	5 orang	198,760,000	APBD		5 orang	198,760,000
3 00 04 30 41	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan	Jumlah diadakan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	Kec.IV Jurai	12 kali	40,819,000	APBD		12 kali	40,819,000
3 00 04 30 42	Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil	Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil	Kec.IV Jurai	300 orang	34,240,700	APBD		300 orang	34,240,700
3 00 04 30 50	Pemetaan Potensi ASN	Tercapainya pemetaan potensi ASN	Kec.IV Jurai	225 orang	154,300,000	APBD		225 orang	154,300,000
3 00 04 30 51	Pembekalan Pasangan Pra Nikah ASN	Terpenuhnya pembekalan pasangan pra nikah ASN	Kec. IV Jurai	50 orang	25,000,000	APBD		50 orang	25,000,000
3 00 04 30 55	Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah sidang yang dilakukan dalam rangka melakukan penilaian kinerja ASN dan evaluasi kinerja ASN	Kec.IV Jurai	7 kali sidang	110,000,000	APBD		7 kali sidang	48,000,000
3 00 04 30 59	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	Tersusunnya tata naskah dinas kepegawalan	Kec.IV Jurai	2700 berkas	72,000,000	APBD		2700 berkas	72,000,000
	Penyuluhan dan sosialisasi Peraturan ASN	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan mengenai peraturan ASN	Kec. IV Jurai	4 sosialisasi	165,000,000	APBD		200 orang	100,000,000
	Pemberian Reward pada PNS Teladan (berkinerja) dan satya lencana karya satya lencana yang diusulkan	Jumlah PNS yang diberikan reward berdasarkan golongan dan berkas satya lencana yang diusulkan	Kec. IV Jurai	PNS Teladan 9 org satya lencana 150 orang	160,000,000	APBD		9 orang	160,000,000
JUMLAH					5,453,512,334	APBD			4,772,539,334

Patran, April 2019
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN DAN
 BADAN KEPEGAWAIAAN PENGEMBANGAN SDM
 DAN PENGEMBANGAN SDM
 IWARDI, S.H
 NIP. 19670601 199503 1 005